



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2024**

**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LUWU**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, SWT karena dengan Rahmat-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan hasil pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh ASN lingkup Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu, sehingga dapat mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan laporan ini, sehingga saran dan masukan sangat kami perlukan demi perbaikan diwaktu yang akan datang.

Belopa, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS,

Drs. HASBULLAH BIN MUSH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199703 1 034



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Isu-Isu Strategis	3
1.4 Keadaan Pegawai	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	7
1.6 Keuangan	8
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	15
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	16
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	22
2.3.1 Target Belanja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu	22
2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	22
2.4 Instrumen Pendukung	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	25
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024.....	37
3.3 Akuntabilitas Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	54



BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menpan dan RB Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu tahun 2024 diharapkan :

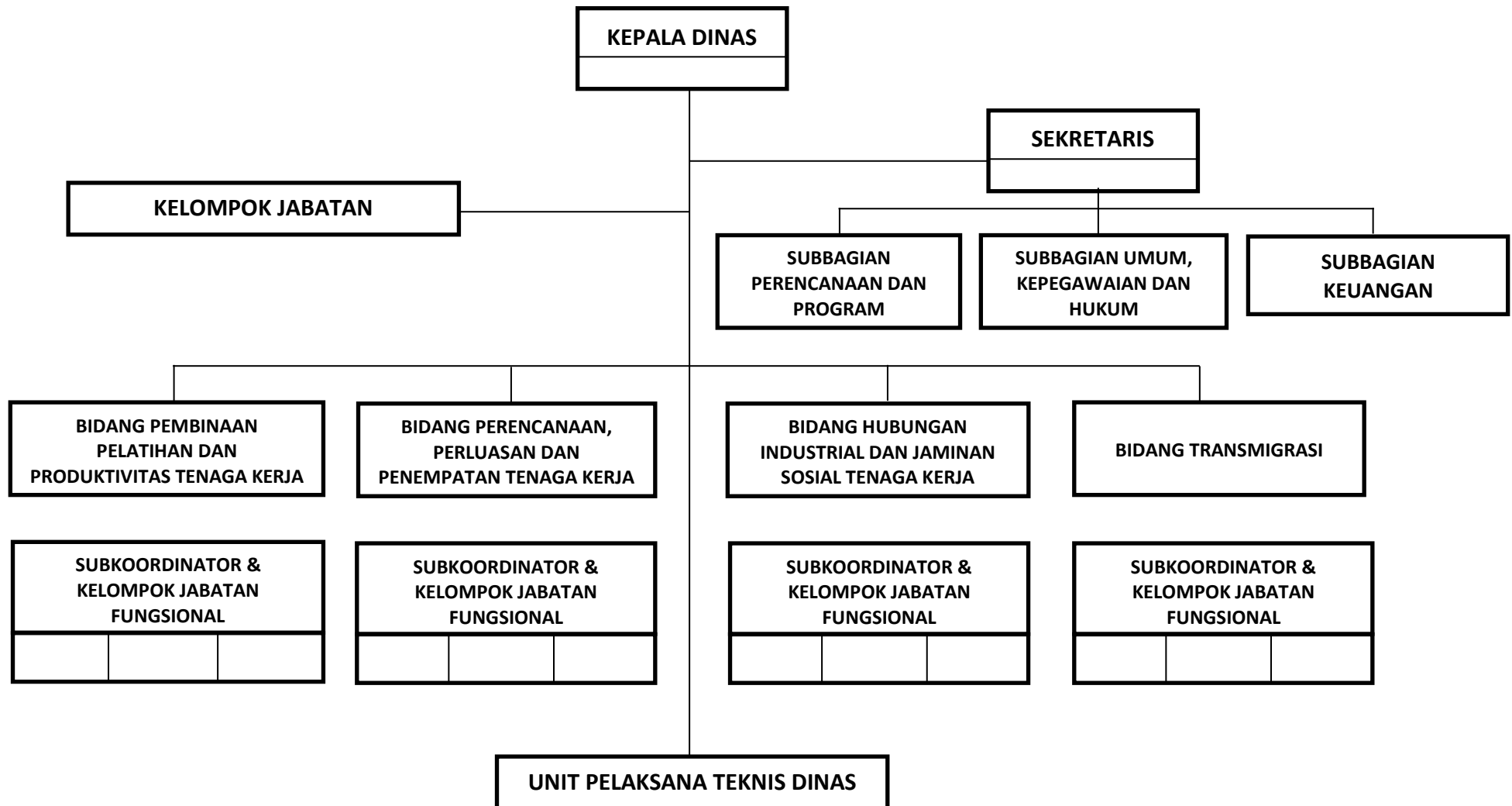
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu
2. Mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya berkesinambungan bagi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Luwu





1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta dekonsentrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu pada tahun 2024, antara lain sebagai berikut :

- a. Masih tingginya angka pengangguran yang berkaitan dengan pengentasan Kemiskinan ekstrim;
- b. Terbukanya investasi bagi perusahaan besar yang berpeluang mendatangkan tenaga kerja asing meningkatkan persaingan bagi tenaga kerja lokal dalam memperoleh lapangan kerja;
- c. Bonus demografi yang berdampak pada meningkatnya Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja membutuhkan perluasan kesempatan kerja;
- d. Tingginya angka keluaran SLTP, SLTA/SMK maupun Perguruan Tinggi menjadi angkatan kerja untuk siap menjadi tenaga kerja.



- e. Masih rendahnya sumberdaya manusia dan keterampilan lulusan Pendidikan untuk memasuki dunia kerja yang semakin melek teknologi digital.
- f. Belum adanya perhatian serius terkait Pekerja Migran Indonesia dalam hal perlindungan kerja.
- g. Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) belum berjalan maksimal.
- h. Hubungan Industrial yang masih belum kondusif sehingga memunculkan terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha;
- i. Pekerja disabilitas masih kurang mendapat peluang kerja di sektor formal;
- j. Masih kurangnya pemahaman masyarakat, pengusaha, dan pekerja terhadap peraturan tentang ketenagakerjaan;
- k. Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan sehingga masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat normatif;
- l. Berkurangnya wilayah/lokasi transmigrasi karena keterbatasan lahan khusus diperuntukan bagi transmigran;
- m. Munculnya konflik kepentingan dalam mempergunakan tata ruang wilayah yang berkaitan dengan transmigrasi;
- n. Belum terkoordinasinya program pengembangan ketransmigrasian sehingga belum dapat dicapai sinkronisasi antara daerah dengan pusat.

1.4 Keadaan Pegawai

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan asset/modal sebagaimana diuraikan di bawah ini

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu sebanyak 69 orang, terdiri dari 48 orang PNS dan 21 orang Pegawai Non PNS.

Tabel 1.1
Komposisi keadaan Pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Menurut Pangkat/Gol. Ruang

Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
II/a	-	-	-
II/b	2	-	2
II/c	3	-	3



II/d	-	-	-
III/a	5	7	12
III/b	2	1	3
III/c	6	6	12
III/d	8	4	12
IV/a	1	2	3
IV/b	-	-	-
IV/c	1	-	1
Tenaga Kontrak	8	13	21
Jumlah	29	40	69

Sumber : Subbagian Kepegawaian Tahun 2024

Dalam memperlancar pencapaian tujuan organisasi, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu didukung oleh kekuatan sumber daya manusia PNS terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 4 (empat) orang Pejabat Eselon III, 5 (lima) orang Pejabat Eselon IV, 8 (delapan) orang pejabat fungsional/penyetaraan jabatan (Pengantar Kerja dan Mediator), 14 (empat belas) orang fungsional instruktur dan 16 (lima belas) orang fungsional umum.

Selain ASN yang telah disebutkan di atas, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu dalam melaksanakan fungsinya juga didukung oleh Tenaga Kontrak sebanyak 21 (tiga puluh satu) orang terdiri dari 8 (delapan) orang laki-laki dan 13 (tiga belas) orang perempuan. Masing-masing adalah Caraka 2 (tiga) orang, Kebersihan 2 (dua) orang, Tenaga administrasi 6 (enam) orang, Arsiparis 2 (dua) orang, Operator 4 (empat) orang, Operator SIMDA 2 (dua) orang, petugas jaga malam 2 (dua) orang dan Supir 1 orang.

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, sumberdaya aparatur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu 2024 memiliki tingkat pendidikan yang cukup kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari S2, S1, D3 dan SMA. Komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 1.2
Komposisi PNS Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan tahun 2024

Pendidikan	Jenis Kelamin		Total	Prosentase
	Laki-Laki	Perempuan		
SMA/Sederajat	6	1	7	14,58
D III	2	3	5	10,42
S1	18	12	30	62,50
S2	2	4	6	12,50
Jumlah	28	20	48	100

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu berjumlah 30 orang (62,50%), menyusul SMA/Sederajat berjumlah 7 orang (14,58%), S2 berjumlah 6 orang (12,50%) dan Diploma III berjumlah 5 orang (10,42%). Tingkat pendidikan ini belum menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang dapat diandalkan.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu dengan adanya Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 tahun 2016 yang diubah pada Peraturan Bupati Luwu Nomor 120 Tahun 2021 Kedudukan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu menyebabkan adanya perubahan komposisi jabatan yang dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Komposisi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu
Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun
2024

No	Jabatan	Jumlah Eselon			Ket
		Kebutuhan	Terisi	Lowong	
1.	Eselon II	1	1	-	Memenuhi
2.	Eselon III.a	1	1	-	Memenuhi
3.	Eselon III.b	4	3	1	Belum Memenuhi
4.	Eselon IV.a	4	4	-	Memenuhi
5.	Fungsional Penyetaraan	12	9	3	Memenuhi
6.	Fungsional Khusus	21	15	8	Belum Memenuhi
7.	Fungsional Umum	18	14	2	Belum Memenuhi
Jumlah		61	48	14	

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2024



1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Aset yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu sejak tahun 2017 Sampai 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Daftar sarana dan Prasarana OPD

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Keterse diaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Bangunan dan Gedung						
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit	1	0	0	100,00
Bangunan Workshop Pelatihan Kerja	6	Unit	2	1	0	50,00
Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga						
AC Split	10	Unit	7	0	0	70,00
Brankas	1	Unit	1	0	1	100,00
Camera Elektronik	2	Unit	1	0	1	50,00
Computer Dekstop (PC)	20	Unit	9	0	0	45,00
Computer Laptop	10	Unit	4	0	4	40,00
Dispenser	2	Unit	0	0	0	-
Filling besi/metal	5	Unit	1	0	0	20,00
Gorden	20	Unit	2	0	0	10,00
Kursi Kerja	30	Buah	30	0	0	100,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	1	0	0	100,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah	2	0	0	40,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Buah	4	0	0	100,00
Kursi Rapat Pejabat	8	Buah	2	0	0	25,00
Kursi Tamu	3	Buah	1	0	0	33,33
Kursi Tunggu	4	Buah	0	0	0	-
Lemari Es	3	Unit	2	0	0	66,67
Lemari Arsip Kayu	7	Buah	4	0	0	57,14
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	1	0	0	100,00
Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah	2	0	0	40,00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Buah	4	0	0	100,00
Meja Kerja Pelayanan	5	Buah	3	0	0	60,00



Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Ketersediaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Mesin Absensi Fingerprint	2	Buah	2	0	0	100,00
Mesin Pompa Air	1	Unit	1	0	0	100,00
Televisi	3	Unit	3	0	0	100,00
UPS/Internet Wifi	2	Unit	2	0	0	100,00
Kendaraan Bermotor						
Kendaraan Roda 2	10	Unit	7	0	0	70,00
Kendaraan Roda 4	3	Unit	2	0	1	66,67
Peralatan Studio						
Wireless	2	Unit	1	1	0	100,00
Infocus	2	Unit	1	0	1	50,00
Peralatan Mesin dan Pertukangan (Pelatihan Kerja)						
Mesin Ketam	16	Unit	4	0	0	25,00
Mesin Las	16	Unit	4	0	0	25,00
Mesin Ketam Listrik(modem/M2900)	1	Unit	1	0	0	100,00
Mesin Bor Wifro/MK 361 A	16	Unit	2	0	0	12,50
Mesin Bor tangan	16	Unit	2	0	0	12,50
Mesin Gergaji	5	Unit	2	1	0	60,00
Boneka Manekin	16	Unit	10	0	0	62,50
Rata-rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana						65,93

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan rata-rata ketersediaan sarana dan prasarana 65,93. Jika dilihat pada rincian, kondisi sarana/Gedung pelatihan kerja masih 50%. Hal ini disebabkan ketersediaan sarana bangunan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja, Desa Karang-karangan Kec. Bua, Kab. Luwu, masih minim.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Luwu. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.193.918.813,- dengan rincian belanja Pegawai sebesar Rp.4.690.179.993,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.906.215.616,- serta belanja Modal sebesar Rp.597.523.204,-,



Anggaran tersebut untuk mendanai 5 program, 13 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

Tabel 1.5
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Rp	Target	Rp
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	persen	100	5.510.257.323	100	5.277.003.466
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	13.073.898	100	3.787.306
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10.521.240	2	2.021.240
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	427.648	1	231.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	427.648	1	231.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	466.648	1	270.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	466.648	1	270.000



NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Rp	Target	Rp
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	764.066	1	764.066
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	persen	100	4.878.248.619	100	4.684.179.993
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	660	4.771.448.619	636	4.577.379.993
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	106.800.000	12	106.800.000
		Administrasi Barang Milik Dari pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	persen	100	6.464.181	100	6.464.181
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	6.464.181	1	6.464.181
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	persen	100	265.607.238	100	255.743.238
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	3.106.200	1	3.106.200
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	4.176.000	1	4.176.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	11.088.176	2	9.088.176
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	7	8.400.000	7	8.400.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	6	31.517.462	6	30.503.462
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	10.654.400	2	8.454.400



NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Rp	Target	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	196.665.000	2	192.015.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	persen	100	288.465.000	100	266.233.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	24.800.000	1	24.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	73.130.000	1	63.998.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	5.735.000	1	5.735.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	184.800.000	2	172.500.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai ketentuan/kebutuhan	persen	100	58.398.387	100	60.595.748
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	53.887.800	15	56.071.311
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	unit	1	4.510.587	1	4.524.437
2	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan jenis pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan	persen	90	85.189.480	90	687.812.684



NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Rp	Target	Rp
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	persen	60	66.773.250	60	669.396.454
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	orang	16	66.773.250	16	71.873.250
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	1	-	1	597.523.204
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang aktif	LPK	4	18.416.230	4	18.416.230
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja Swasta yang dibina	LPK	4	18.416.230	4	18.416.230
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	persen	7,41	57.748.622	7,41	55.803.622
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	persen	100	34.632.930	100	34.632.930
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKD dan AKL	orang	30	34.632.930	30	34.632.930
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten	Persen	30	23.115.692	30	21.170.692
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	3	23.115.692	3	21.170.692



NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Rp	Target	Rp
4	Meningkatnya Penempatan dan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal	Hubungan Industrial	Persentase perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak	Persen	39,1	742.016.164	39,1	1.143.513.564
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	perusahaan	100	23.362.147	100	24.912.147
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	23.362.147	1	24.912.147
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	persen	100	718.654.017	100	1.118.601.417
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	2	18.058.724	2	14.935.724
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Tenaga Kerja	orang	12484	700.595.293	12484	1.103.665.693



NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Rp	Target	Rp
5	Meningkatnya Perekonomian Satuan Permukiman Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Ha	12	31.585.477	12	29.785.477
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	lokasi	1	31.585.477	1	29.785.477
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	50	31.585.477	50	29.785.477
TOTAL ANGGARAN						6.426.797.066		7.193.918.813

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyusunan LKjIP Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2024 meliputi :

Bab I Pendahuluan

Merupakan uraian pendahuluan yang memuat struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu-isu strategis, Kadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan dan sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Merupakan uraian Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang memuat Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran dan Instrumen Pendukung.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Merupakan uraian Akuntabilitas Kinerja yang memuat Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya dan Akuntabilitas Anggaran

Bab VIII Penutup

Merupakan uraian penutup yang memuat kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/legagalan,



permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan dan strategi pemecahan masalah.



BAB II **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu merupakan manifestasi komitmen dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kab. Luwu Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 8 Tahun 2019 yang telah mengalami perubahan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Tahun 2019-2024

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Nomor KEP.018/NAKER//2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kab. Luwu Tahun 2019-2024.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Luwu yang hendak dicapai pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**“KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI,
DALAM NUANSA RELIGI”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :



1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten Luwu yang religius.
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.
9. Menegakkan supreme hukum, hak azazi manusia untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengemban tugas sejalan dengan Misi ke-4 yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan rumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah pada periode tertentu. Tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu dirumuskan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang telah mengalami Perubahan pada tahun sebelumnya (Perda No. 3 Tahun 2021). Adapun tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu adalah sebagai berikut :



1 Tujuan Pembangunan Jangka Menengah OPD

Adapun tujuan pembangunan Jangka Menengah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif;
2. Menurunkan Angka Pengangguran;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.

2 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah OPD

Adapun sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kesempatan kerja;
3. Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal;
4. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
5. Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif		Indeks Reformasi Birokrasi	67,25% (B)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	78,80% (BB)
2	Menurunkan Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,78%



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
		Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	65,02%
		Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal	Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industry	74,15%
		Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Rasio lulusan pelatihan yang bekerja	35,12%
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi		Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang	100%
		Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang dibina	1 Kawasan

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah juga didukung oleh pencapaian sejumlah indikator teknis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu.

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Mengacu kepada visi dan misi RPJMD maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu, melaksanakan kegiatan pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu TA 2019–2024 sebagai berikut :

A Bidang Ketenagakerjaan

- a Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja
- b Pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja



- c Pembinaan hubungan industrial dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
- d Pengembangan kualitas sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

B Bidang Transmigrasi

Program pemukiman dan lingkungan ditujukan untuk dapat menunjang kepada berkembangnya UPT yang ada serta penyelesaian UPT bermasalah yang diakibatkan oleh faktor fisik lingkungan. Pembangunan permukiman transmigrasi baru diarahkan pada terwujudnya kondisi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang sehingga dapat merupakan basis dan titik tolak pengembangan pertanian dan perekonomian unit permukiman transmigrasi sampai kepada tingkat perkembangan tertentu. Pengembangan permukiman yang status pertanahannya sudah jelas serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dimana Penyelesaian penanganan UPT bermasalah sebagai prioritas pembinaan UPT.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan target kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu yang mengacu pada visi dan misi kepala daerah dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

VISI : Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi			
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Professional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kapabilitas perangkat daerah	Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia
VISI : Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi			
MISI 4 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, melalui Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja			



Menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatnya kesempatan kerja	Peningkatan kesempatan kerja	Pengembangan rencana tenaga kerja
	Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal	Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja formal dipasar kerja	Peningkatan pelayanan dan informasi ketenagakerjaan
			Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak disektor formal dan perlindungan tenaga kerja disektor informal
		Pemberdayaan usaha mandiri dan padat karya untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	Pengembangan dan perluasan penciptaan kesempatan kerja disektor informal yang produktif
		Meningkatkan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial, dan program keselamatan dan kesehatan kerja	Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, dinamis, bernartabat dan berkeadilan
	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas tenaga kerja
			Peningkatan produktivitas tenaga kerja guna mencetak tenaga kerja dan wirausaha kreatif yang berdaya saing
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi	Peningkatan pemukiman transmigrasi dan pembinaan transmigrasi	pemenuhan sarana prasarana dasar di pemukiman transmigrasi serta pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigrasi



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	-	78,80% (BB)	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25 % 50 % 75 % 100 %
2.	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	Persen	65,02%	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25 % 50 % 75 % 100 %
3.	Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal	Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri	Persen	74,15%	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25 % 50 % 75 % 100 %
4.	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Rasio lulusan pelatihan yang bekerja	Persen	35,12%	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25 % 50 % 75 % 100 %
5.	Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang dibina	Kawasan	1	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25 % 50 % 75 % 100 %



2.3 Rencana Anggaran 2024

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.193.918.813,- dengan rincian belanja Pegawai sebesar Rp. 4,690.179.993,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.906.215.616,- dan Belanja Modal sebesar Rp.597.523.204,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja tersebut bersumber dari APBD yang terdiri atas 5 program, 13 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

2.3.1 Target Belanja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu
Adapun target Belanja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target Belanja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu

No.	Uraian	Target	Persentase
1.	Belanja Pegawai	4.690.179.993	65,20
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.906.215.616	26,50
3.	Belanja Modal	597.523.204	8,31
	Jumlah	7.193.918.813	100,00

2.3.2` Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2024 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket.
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.787.306	Didukung 1 program, 6 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.684.179.993	
			Administrasi Barang Milik	6.464.181	



No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket.
			Dari pada Perangkat Daerah		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.743.238	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.233.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.595.748	
2.	Meningkatnya kesempatan kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten	34.632.930	Didukung 1 program, 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	21.170.692	
3	Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal	Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	24.912.147	Di dukung 1 program dan 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja	1.118.601.417	



No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket.
			dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten		
4.	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	669.396.454	Di dukung 1 program dan 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	18.416.230	
5.	Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	29.785.477	Di dukung 1 program dan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan

2.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu yang mendukung pelaksanaan SAKIP di OPD antara lain adanya Media Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang berisi informasi yang terkait kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu antara lain info pelatihan kerja, info lowongan kerja dan informasi lain terkait Disnakertrans yang perlu diketahui masyarakat umum.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian optimal indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu pada tahun penilaian. Capaian ini menunjukkan kemampuan perangkat daerah melaksanakan peningkatan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana target yang telah ditetapkan. Kesenjangan yang terjadi antara target dan capaian menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan melakukan perubahan ataupun inovasi yang memungkinkan bagi perbaikan kinerja perangkat daerah.

Secara makro, pada tahun 2024 tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan mengalami penyimpangan dari target dengan meningkatnya kembali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,70% pada tahun 2023 menjadi pada angka 4,14% pada tahun 2024. Kondisi ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan Angkatan kerja yang meningkat (bonus demografi) dan adanya kejadian bencana alam (banjir dan longsor) yang menyebabkan pekerja informal terutama di sektor pertanian dan perkebunan tidak produktif. Secara sektoral, kondisi ini turut mempengaruhi pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu :

a. Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama perangkat daerah ditujukan untuk mengukur kinerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.



Berikut target dan capaian/realisasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu tahun 2024 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah, dirinci pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA	KET
				TARGET	REALISASI		
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	76,07	78,80	n.a	n.a	Masih dalam proses dinilai
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	68,61	65,02	68,76	105,75	
3	Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal	Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri	50,46	74,15	49,75	67,09	
4	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Rasio lulusan pelatihan yang bekerja	22,92	35,12	45,51	129,58	
5	Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang dibina	1	1	1	100.00	

Pada tabel dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian predikat penilaian implementasi SAKIP belum terdapat realisasi disebabkan proses penilaiannya masih sementara dilakukan oleh Tim Inspektorat. Meskipun demikian jika dicermati pada tahun sebelumnya (tahun 2023) nilai SAKIP yang diperoleh telah melebihi target sebagaimana yang ditargetkan dalam Renstra dan Renja perangkat daerah. Penilaian ini dilakukan dengan mengukur kelengkapan dan kualitas dokumen SAKIP perangkat daerah.



2. Capaian persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja pada tahun 2024 mencapai nilai 68,76%. Seperti tahun sebelumnya (tahun 2023), tahun 2024 juga menunjukkan pencapaian yang baik dengan melebihi target yang direncanakan (target Renstra perangkat daerah). Pencapaian ini diukur dari jumlah Angkatan kerja yang telah bekerja pada tahun 2024 berjumlah 190.018. jiwa (*data BPS, Luwu dalam Angka 2025*) terhadap jumlah penduduk usia kerja yang berjumlah 288.275 jiwa (*data BPS, Luwu dalam Angka 2025*).
3. Capaian persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri di Kabupaten Luwu mengalami penurunan pada angka 49,75% menurun 0,71% dari tahun sebelumnya (*Diolah dari Data BPS Tahun 2025*).. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran sektor lapangan kerja dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri ke sektor lainnya. Meskipun demikian, sektor ini masih menyerap tenaga kerja lebih besar sebab mengingat sektor ini merupakan alternatif peluang kerja bagi tenaga kerja di Kabupaten Luwu.
4. Capaian rasio lulusan pelatihan yang bekerja menunjukkan capaian yang sangat meningkat dari tahun sebelumnya yakni berada pada angka 45,51% atau meningkat 22,59% dari tahun sebelumnya. Capaian ini diukur dari jumlah tenaga kerja yang dilatih tahun 2023 adalah 156 orang terhadap jumlah yang terserap bekerja sebanyak 71 orang. Peningkatan ini terutama disebabkan sebagian besar lulusan pelatihan beinsiatif untuk membuka usaha/lapangan kerja secara mandiri setelah sebelumnya berusaha untuk menempati lowongan kerja di sektor formal. Kebutuhan di sektor formal yang belum sesuai dengan kondisi kompetensi tenaga kerja masih membutuhkan upaya peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja. Salah satu diantaranya kompetensi yang dibutuhkan adalah pelatihan alat berat yang banyak dibutuhkan oleh beberapa perusahaan industri besar di Kabupaten Luwu.
5. Capaian jumlah kawasan transmigrasi yg dibina tercapai 100% dengan dilaksanakannya penguatan sumber daya manusia di wilayah Kawasan transmigrasi di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua Kab. Luwu.

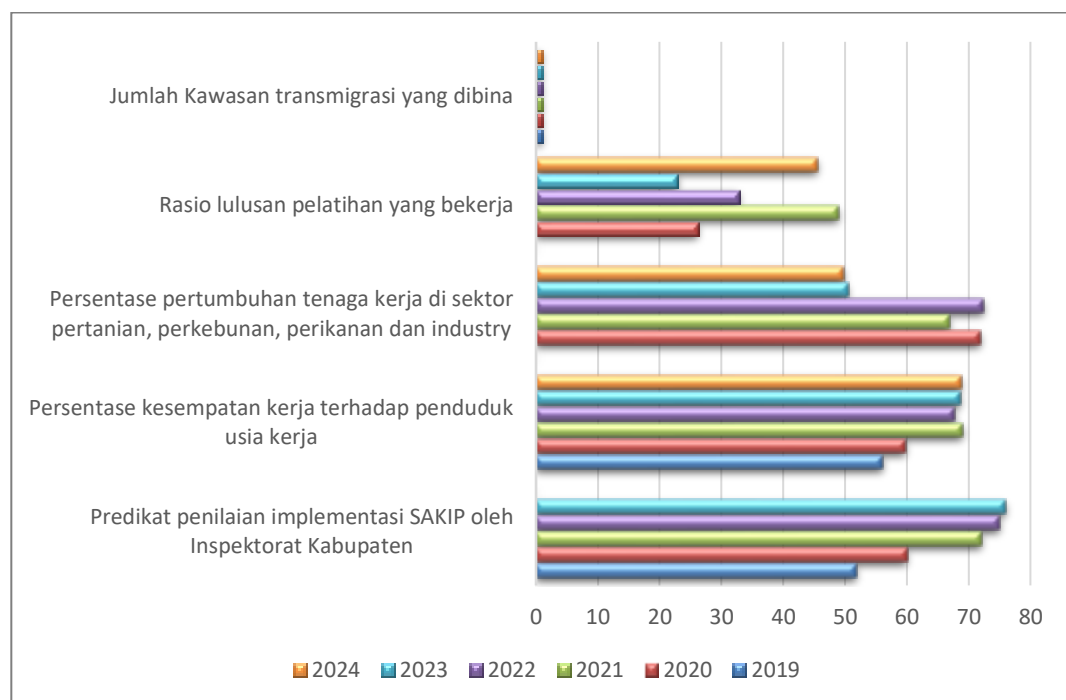


Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra Tahun 2019-2024 dapat digambarkan perkembangan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perkembangan Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	51,78	60,04	72,1	75,02	76,07	n.a
2	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	56,07	59,74	69,00	67,74	68,61	68,76
3	Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industry	n.a	71,94	66,89	72,39	50,46	49,75
4	Rasio lulusan pelatihan yang bekerja	n.a	26,2	48,98	32,87	22,92	45,51
5	Jumlah Kawasan transmigrasi yang dibina	1	1	1	1	1	1

Gambar 3.1
Grafik Capaian Kinerja berdasarkan IKU Tahun 2019 - 2024



Berdasarkan tabel dan grafik perkembangan capaian kinerja berdasarkan IKU tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami kemajuan setiap tahunnya yakni Nilai SAKIP dan persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Peningkatan pada nilai SAKIP menunjukkan adanya peningkatan kualitas dokumen. Dan peningkatan pada indikator kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja menunjukkan pencapaian di bidang ketenagakerjaan yang menunjukkan meningkatnya angka tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan. Namunpun demikian angka ini belum bisa menjamin menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada terakhir periode Renstra 2019-2024, TPT kembali meningkat mencapai 4,14% pada tahun 2024 setelah sebelumnya menurun dari angka 3,85% pada tahun 2022 menjadi 3,70% pada tahun 2023 (Data BPS, Tahun 2022 - 2024). Berbagai hal dapat menjadi penyebab peningkatan ini diantaranya jumlah angkatan kerja yang bertambah (bonus demografi), penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal yang rendah, kehilangan pekerjaan (sektor informal) akibat bencana banjir dan longsor, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, dari tabel dan grafik tersebut terlihat 2 (dua) indikator lainnya yang berkembang secara fluktuatif yakni Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri serta rasio lulusan Pelatihan yang bekerja. Umumnya Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri didominasi oleh sektor informal sehingga pekerja pada sektor ini relatif tidak terikat. Sedangkan pada indikator rasio lulusan pelatihan yang bekerja bergerak fluktuatif karena dipengaruhi oleh kapasitas pelatihan yang disediakan serta ketersediaan lapangan kerja atau usaha.

Selain itu, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mengalami perkembangan yakni jumlah Kawasan transmigrasi yang dibina. Hal ini disebabkan belum adanya rencana Kawasan transmigrasi yang jelas untuk dikembangkan sebagai pemukiman transmigrasi yang mandiri.

b. Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja juga ditopang dengan Indikator kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan



urusan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu pada Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Capaian 2023	Tahun 2024		%
			Target	Capaian	
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	43,48	48,89	46,15	94,40
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	28,65	70,50	50,64	71,83
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp.Juta/pekerja)	61,92	111,04	64,08	57,71
4	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten (%)	1,45	7,41	20,97	283,00
5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	24,31	52,10	16,85	32,34
6	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	1	1	100,00
7	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	1	0	0,00
8	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1	1	1	100,00



Berdasarkan tabel capaian indikator di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar indikator mengalami penurunan yang cukup rendah yang menunjukkan adanya kinerja yang tidak terpenuhi di bidang ketenagakerjaan. Capaian-capaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana tenaga kerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan mencapai 46,15% dari tahun sebelumnya 43,48%. Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan adalah 6 kegiatan dari 13 kegiatan bidang ketenagakerjaan keseluruhan yang direncanakan dalam Renstra dan RTKD perangkat daerah.
2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi meningkat 21,99% dari tahun sebelumnya dengan realisasi 50,64%, meskipun belum memenuhi target target yang ditetapkan. Tenaga kerja yang lulus kompetensi sejumlah 79 orang dari 156 orang yang dilatih.
3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 64,08%. Jumlah ini diperoleh dari PDRB berdasarkan harga konstan Tahun 2024 yakni 12,17 Triliun Rupiah terhadap jumlah orang yang bekerja tahun 2024 sejumlah 190.018 jiwa.
4. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja mengalami peningkatan yang sangat drastis dengan realisasi 20,97% atau 845 orang dari jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 4030 orang.
5. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 16,85% atau 32,34% dari target yang ditetapkan. Jumlah perusahaan dengan tata Kelola yang layak adalah 76 perusahaan dari 451 perusahaan (besar, menengah dan kecil) di wilayah Kabupaten Luwu pada tahun 2024.
6. Pada 3 (tiga) indikator terakhir terkait bidang transmigrasi, capaian yang diperoleh hanya pada 2 (dua) indikator jumlah Kawasan yang difasilitasi penetapannya dan jumlah kawasan yang dibina adalah 1 (satu) kawasan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua, Kab. Luwu.

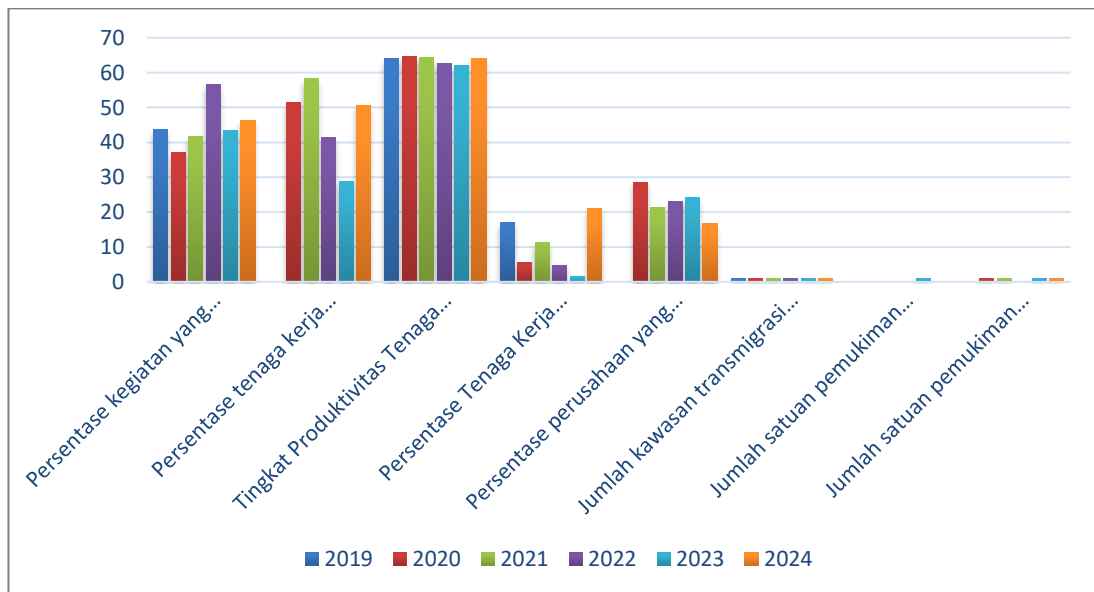


Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode Renstra 2019 - 2024, maka perkembangan capaian indikator kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perkembangan Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	43,75	37,04	41,67	56,52	43,48	46,15
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	n.a	51,38	58,33	41,29	28,65	50,64
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp.Juta/pekerja)	63,93	64,73	64,41	62,75	61,92	64,08
4	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten (%)	17,08	5,45	11,36	4,71	1,45	20,97
5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	n.a	28,6	21,32	22,97	24,14	16,85
6	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	1	1	1	1	1
7	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	0	0	0	1	0
8	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	1	1	0	1	1

Gambar 3.2
Grafik Capaian Kinerja berdasarkan IKK



Pada tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa umumnya capaian indikator kinerja sangat fluktuatif, kecuali capaian indikator tingkat produktivitas dengan capaian relative sama dan capaian indikator bidang ketransmigrasian yang stagnan atau relatif tidak berkembang. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan capaian indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja dipengaruhi oleh isu ketenagakerjaan yang berkembang di daerah dan kondisi pengangguran. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang menyebabkan kegiatan yang diakomodir berubah setiap tahunnya.
- Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi dipengaruhi oleh jenis pelatihan yang disediakan. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi menurun di tahun-tahun awal karena pelatihan berbasis kewirausahaan/masyarakat lebih banyak dilaksanakan yang relatif tidak membutuhkan kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan. Pelatihan-pelatihan tersebut umumnya untuk dapat bekerja secara informal. Sedangkan pada tahun akhir capaian indikator ini meningkat disebabkan pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan lebih banyak agar dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan formal di perusahaan-perusahaan besar yang mulai meluas di Kabupaten Luwu.



- c) Tingkat produktivitas mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya inflasi atau meningkatnya harga komoditi beberapa lapangan usaha. Kondisi ini juga sejalan dengan meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang tidak dipengaruhi inflasi (PDRB berdasarkan harga konstan).
- d) Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten memiliki dinamika yang berubah-ubah disebabkan kondisi lapangan usaha formal sebagian masih dalam tahap awal membuka lapangan usaha sehingga rekrutmen tenaga kerja masih minim. Selain itu, masih kurangnya kesadaran pihak penyedia kerja untuk melaporkan setiap penempatan kerja yang terpenuhi.
- e) Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) juga berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan kesadaran perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja sesuai ketentuan yang berlaku masih perlu dibina.

c. *Capaian Kinerja berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs)*

Capaian Kinerja berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja berdasarkan Tujuan SDGs Tahun 2024

No	Indikator	Capaian 2023	Tahun 2024		%
			Target	Capaian	
1	Persentase tenaga kerja formal	35,09	27,25	36,96	135,63
2	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	n.a	79,06	n.a	n.a
3	Upah rata-rata per jam pekerja	18.752	17.120	19.805	115,68
4	Tingkat setengah pengangguran	7,01	7,01	7,03	100,29
5	Persentase Usia Muda (15- 24 tahun) yang	10,08	9,76	11,70	119,88



No	Indikator	Capaian 2023	Tahun 2024		%
			Target	Capaian	
	sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)				
6	Proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur	4,29	9,72	4,75	48,87
7	Proporsi peserta program SJSN ketenagakerjaan	56,10	81,28	77,94	95,89

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Persentase tenaga kerja formal pada tahun 2024 adalah 36,96%, meningkat dari tahun sebelumnya. Tenaga kerja formal tersebut adalah pegawai negeri, karyawan/buruh perusahaan dan pekerja lainnya yang mendapatkan upah.
2. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian pada tahun 2024 ini tidak dapat diukur disebabkan adanya perubahan komposisi data sektoral yang tidak lagi mengakomodir data pekerja informal sektor pertanian. Meskipun demikian sektor pertanian informal masih menjadi lapangan kerja/usaha utama masyarakat mengingat kepemilikan lahan oleh masyarakat sendiri.
3. Upah rata-rata per jam pekerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan UMP yang juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
4. Tingkat setengah pengangguran meningkat 0,02% tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bertambahnya orang yang bekerja secara normal sesuai standar jam kerja umumnya (rata-rata 40 jam per minggu). Pencapaian sebelumnya memiliki nilai yang sangat tinggi disebabkan adanya kesalahan penetapan target dan pengukuran.
5. Persentase Usia Muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang berdampak pada bertambahnya angka pengangguran di Kabupaten Luwu. Angka net ini diukur dari jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun (termasuk dalam Angkatan kerja usia muda).



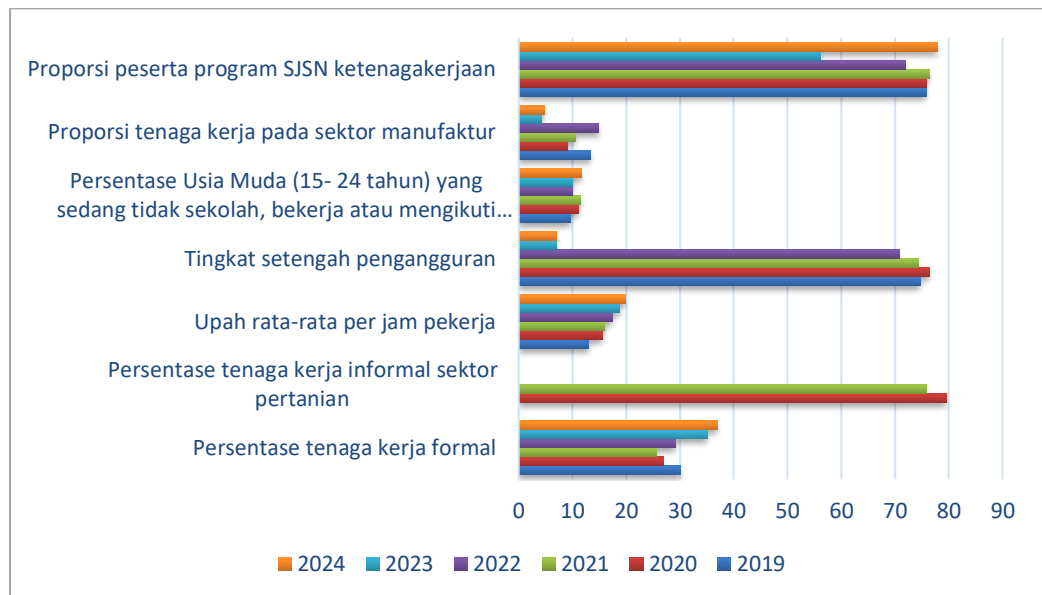
6. Proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur mengalami sedikit peningkatan sebesar 4,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan sektor manufaktur mengalami peningkatan di wilayah Kabupaten Luwu.
7. Proporsi peserta program SJSN ketenagakerjaan kembali meningkat pada angka 77,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan masih terdapat pekerja/buruh belum terakomodir dalam jaminan perlindungan kerja terutama pada perusahaan baru beroperasi di tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun sebelumnya, maka perkembangan capaian kinerja berdasarkan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perkembangan Capaian Kinerja berdasarkan Indikator SDGs
Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tenaga kerja formal	30,07	26,96	25,65	29,17	35,09	36,96
2	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	n.a	79,62	75,85	n.a	n.a	n.a
3	Upah rata-rata per jam pekerja	13.020	15.606	16.025	17.406	18.752	19.805
4	Tingkat setengah pengangguran	74,70	76,37	74,35	70,83	7,01	7,03
5	Persentase Usia Muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	9,71	11,16	11,57	9,92	10,08	11,70
6	Proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur	13,31	9,12	10,50	14,92	4,29	4,75
7	Proporsi peserta program SJSN ketenagakerjaan	75,85	75,79	76,51	71,93	56,10	77,94

Gambar 3.3
Grafik Capaian Kinerja berdasarkan Indikator SDGs Tahun 2019 - 2024



Dari perbandingan tahun 2019 hingga 2024 tergambar bahwa capaian kinerja berdasarkan indikator SDGs cukup fluktuatif kecuali indikator upah rata-rata per jam kerja dan persentase tenaga kerja formal yang terus mengalami peningkatan. Pada sektor pertanian informal, tidak terdapat penyajian datanya 2 tahun terakhir namun sektor ini masih menjadi peluang alternatif tenaga kerja agar tetap bisa mendapatkan penghasilan. Dilain hal, indikator setengah pengangguran dan persentase Usia Muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) mengalami penambahan yang turut berkontribusi pada meningkatnya pengangguran. Sebaliknya, proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur dan proporsi peserta program SJSN ketenagakerjaan mengalami peningkatan di tahun tersebut yang mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat. Perubahan-perubahan yang berfluktuasi tersebut disebabkan ketidakstabilan sosial ekonomi yang mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Luwu.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Hasil Pengukuran kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang baik meskipun masih terdapat 1 (satu) indikator yang masih dalam proses penilaian/pengukuran. Jika dievaluasi dan dianalisis hasil capaian kinerja

tersebut, maka terdapat beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perkembangan investasi pada wilayah tertentu (Kecamatan Bua dan Latimojong) mendorong kesempatan kerja yang bergeser pada sektor konstruksi dan manufaktur yang bersifat formal.
2. Penempatan kerja belum dapat diprediksi dengan tidak adanya rencana tenaga kerja secara mikro oleh perusahaan yang dapat menggambarkan kebutuhan kompetensi tenaga kerja ke depan.
3. Kualitas sumber daya aparatur yang melaksanakan kegiatan belum disesuaikan dengan tupoksi dan kompetensinya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan mengingat perubahan kebijakan dan mekanisme pengelolaan anggaran terus mengalami perubahan.
4. Pemanfaatan Informasi teknologi dalam pengelolaan informasi kerja dan ketenagakerjaan belum terintegrasi dengan baik pada masyarakat dan pihak terkait.

3.3 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 94,92% atau Rp. 6.828.662.031,- dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.193.918.813,-. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah. Kinerja anggaran menjadi faktor penting berjalannya program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Jika ditinjau dari kinerja anggaran maka realisasi pengelolaan keuangan perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Dalam pencapaian sasaran dan indikator ini didukung oleh 1 (satu) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.5.277.003.466,- yang terealisasi sebesar Rp.4.927.639.866,- dengan kegiatan/sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Anggaran pada Sasaran Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah



NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.787.306	2.590.500	68,40	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 100%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.021.240	1.931.500	95,56	1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Renja Perubahan
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	231.000	0	0,00	1 Dokumen RKA-PD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	231.000	0	0,00	1 Dokumen Perubahan RKA-PD
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	270.000	0	0,00	1 Dokumen DPA-PD
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	270.000	0	0,00	1 Dokumen Perubahan DPA-PD
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	764.066	659.000	86,25	1 Dokumen LKlJP
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.684.179.993	4.399.038.399	93,91	Penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah 100%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.577.379.993	4.327.838.399	94,55	Gaji dan Tunjangan ASN sejumlah 53 orang selama 12 bulan
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	106.800.000	71.200.000	66,67	Honorarium pengelola keuangan sejumlah 9 orang dan Honorarium pengelola barang dan jasa 1 orang
3	Administrasi Barang Milik Dari pada Perangkat Daerah	6.464.181	4.372.000	67,63	Administrasi Barang milik daerah terselenggara 100%
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.464.181	4.372.000	67,63	Dokumen penatausahaan barang 2 Laporan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.844.250	326.588.301	96,29	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum 100%
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.106.200	3.104.800	99,95	Komponen Listrik sebanyak 1 Paket



NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.176.000	4.175.950	100,00	Logistik kantor sebanyak 1 Paket
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.088.176	9.087.000	99,99	Cetak dan Fotocopy sebanyak 2 Paket
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000	6.600.000	78,57	Surat Kabar sebanyak 7 Dokumen
4.5	Penyediaan Bahan/Material	30.503.462	30.449.120	99,82	ATK, Kertas, Bahan Komputer dan bahan lainnya sebanyak 6 Paket
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.454.400	8.450.000	99,95	Makanan dan Minuman Tamu sebanyak 2 Paket
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.015.000	184.235.860	95,95	Koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah terangkum dalam 2 Laporan
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.233.000	260.061.847	97,68	Jasa Penunjang Urusan 100%
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.000.000	24.000.000	100,00	Surat Dinas sebanyak 1 Dokumen selama 1 tahun dikelola oleh 2 orang arsiparis dan 2 orang Caraka
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.998.000	57.836.847	90,37	Biaya tagihan listrik dan internet selama 1 Tahun
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.735.000	5.725.000	99,83	Jasa Perbaikan peralatan kantor sebanyak 2 Jenis
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.500.000	172.500.000	100,00	Jasa tenaga Administrasi 10 orang, operator komputer 7 orang, operator SIMDA 1 orang, Tenaga Kebersihan 2 orang, Penjaga Kantor 2 orang selama 12 bulan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.595.748	60.474.390	99,80	Barang Milik Daerah yang dipelihara 100%
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	56.071.311	55.958.390	99,80	Biaya STNK untuk 15 unit, Suku Cadang dan Service serta BBM



NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
	Dinas Operasional atau Lapangan				selama 12 bulan
6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.524.437	4.516.000	99,81	Biaya perbaikan/pemeliharaan kantor dengan luas 75 m2
TOTAL		5.277.003.466	4.972.639.866	94,23	

Pada tabel terlihat bahwa realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar 94,23%. Realisasi ini menghasilkan output berupa kegiatan rutin/operasional kantor yang menunjang tercapainya akuntabilitas kinerja perangkat daerah berkaitan dengan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan administrasi umum lainnya.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kesempatan Kerja

Pencapaian sasaran dan indikator ini didukung oleh Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp.55.803.622,- yang terealisasi sebesar Rp. 48.945.100,- dengan kegiatan/sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Anggaran pada Sasaran Peningkatan Kesempatan Kerja

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten	34.632.930	30.284.100	87,44	pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 20,97%
1.1	Pelayanan antar Kerja	34.632.930	30.284.100	87,44	Pelayanan antar kerja 1 jenis (pelayanan AK 1) selama 12 bulan dengan jumlah pencari kerja 4.030 orang



NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	21.170.692	18.661.000	88,15	PMI yang mendapat perlindungan sebesar 5%
2.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	21.170.692	18.661.000	88,15	PMI yang mendapat peningkatan kompetensi 15 orang
TOTAL		55.803.622	48.945.100	87,71	

Pada tabel terlihat bahwa program tersebut terealisasi 87,71% yang menunjukkan adanya optimalisasi anggaran untuk bidang ketenagakerjaan. Meskipun demikian, beberapa kegiatan lain terkait ketenagakerjaan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja bidang ketenagakerjaan, seperti Peningkatan sumber daya pelayanan melalui penerapan ISO untuk perbaikan kualitas pelayanan dan *Job Fair*.

Sasaran 3 : Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal

Pencapaian sasaran dan indikator ini juga didukung oleh 1 (satu) program yakni Program Hubungan Industrial dengan anggaran sebesar Rp.1.143.513.564,- yang terealisasi sebesar Rp.1.111.056.200,- dengan kegiatan/sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Anggaran pada Sasaran Peningkatan penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	24.912.147	16.195.900	65,01	76 perusahaan telah memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	24.912.147	16.195.900	65,01	1 Dokumen data/informasi perusahaan terkait hubungan industrial



NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	1.118.601.417	1.094.860.300	97,88	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja mencapai 90%
2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	14.935.724	13.311.800	89,13	Sosialisasi pencegahan perselisihan HI sebanyak 1 kegiatan
2.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.103.665.693	1.081.548.500	98,00	Jaminan sosial/BPJS Ketenagakerjaan Non ASN sebanyak 12.234 orang dan Pekerja Rentan sebanyak 1.984 orang selama 12 bulan
TOTAL		1.143.513.564	1.111.056.200	97,16	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Program Hubungan Industrial terealisasi optimal sebesar 97,16%. Output kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran ini menyajikan dokumen gambaran kuantitas dan kualitas perusahaan dalam hubungan dengan pekerja/buruh dan jaminan ketenagakerjaan yang didapatkan. Pada program ini perusahaan dan usaha kecil menengah teridentifikasi dengan jelas kondisi tenaga kerja, kompetensi serta jaminan yang diberikan. Selain itu, terdapat peningkatan pemberian jaminan ketenagakerjaan bukan hanya untuk pegawai Non ASN dan Petugas Keagamaan tetapi pekerja rentan yang terindikasi miskin ekstrem pun telah mendapat jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Adanya gambaran tersebut menunjukkan adanya akomodasi yang besar untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan bidang ketenagakerjaan yang dapat mendorong menurunnya pengangguran.



Sasaran 4 : Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Pencapaian sasaran dan indikator ini didukung pula oleh 1 (satu) program yakni Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp.687.812.684,- yang terealisasi sebesar Rp.679.891.165,- dengan kegiatan/sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Anggaran pada Sasaran Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	669.396.454	664.585.565	99,28	Penyelenggaraan pelatihan 60%
1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	71.873.250	67.103.200	93,36	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan (<i>Fishery Industry</i>) diikuti oleh 16 orang peserta
1.2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	597.523.204	597.482.365	99,99	Pelunasan Pembangunan Gedung Workshop BLK tahun 2023 sebanyak 1 Unit
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	18.416.230	15.305.600	83,11	Terbinanya 6 LPK (BLKK)
2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	18.416.230	15.305.600	83,11	Monev dan pembinaan 6 BLKK
TOTAL		687.812.684	679.891.165	98,85	

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di atas terealisasi sebesar 98,85%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan optimal. Salah satu sub kegiatan dalam realisasi program ini adalah tindak lanjut terhadap penyelesaian kegiatan tahun 2023 yakni Pelunasan Pembangunan Workshop BLK pada sub kegiatan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota yang telah dirampungkan pada tahun 2024.

Sasaran 5 : Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi

Pencapaian sasaran dan indikator ini didukung oleh 1 (satu) program yakni Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan anggaran



sebesar Rp. 29.785.477,- yang terealisasi sebesar Rp. 16.129.700,- dengan kegiatan/sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Anggaran pada Sasaran Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	29.785.477	16.129.700	54,15	1 kawasan transmigrasi yang dikembangkan
1.1	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	29.785.477	16.129.700	54,15	Pembinaan pemanfaatan Lahan Transmigrasi di Desa Bukit Harapan Kec. Bua
TOTAL		29.785.477	16.129.700	54,15	

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi di atas terealisasi 54,15% dengan output berupa Pembinaan Pemanfaatan Lahan Transmigrasi bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kab. Luwu di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

Secara terinci, rekapitulasi target dan realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut :



TABEL 3.12
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU

NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	5.277.003.466	4.972.639.866	94,23	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	100	3.787.306	2.590.500	68,40	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2.021.240	1.931.500	95,56	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	231.000	0	0,00	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	231.000	0	0,00	100
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	270.000	0	0,00	100



NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	270.000	0	0,00	100
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	764.066	659.000	86,25	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	4.684.179.993	4.399.038.399	93,912668	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	636	636	4.577.379.993	4.327.838.399	94,55	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	14	106.800.000	71.200.000	66,67	100
1.3	Administrasi Barang Milik Dari pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	persen	100	100	6.464.181	4.372.000	67,63	100
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	6.464.181	4.372.000	67,63	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	persen	100	100	255.743.238	246.102.730	96,23	100



NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	8	8	3.106.200	3.104.800	99,95	100
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	7	7	4.176.000	4.175.950	100,00	100
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	4	9.088.176	9.087.000	99,99	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5	8.400.000	6.600.000	78,57	100
1.4.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	6	6	30.503.462	30.449.120	99,82	100
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	8.454.400	8.450.000	99,95	100
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	192.015.000	184.235.860	95,95	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	persen	100	100	266.233.000	260.061.847	97,68	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	24.000.000	24.000.000	100,00	100



NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	63.998.000	57.836.847	90,37	100
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	5.735.000	5.725.000	99,83	100
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	264	264	172.500.000	172.500.000	100,00	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai ketentuan/kebutuhan	persen	100	100	60.595.748	60.474.390	99,80	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	15	56.071.311	55.958.390	99,80	100
1.6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	unit	1	1	4.524.437	4.516.000	99,81	100
2	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan jenis pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan	persen	90	90	687.812.684	679.891.165	98,85	100



NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
2.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	persen	60	60	669.396.454	664.585.565	99,28	100
2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	orang	16	16	71.873.250	67.103.200	93,36	100
2.1.2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	unit	1	1	597.523.204	597.482.365	99,99	100
2.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang aktif	LPK	4	6	18.416.230	15.305.600	83,11	100
2.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja Swasta yang dibina	LPK	4	6	18.416.230	15.305.600	83,11	100
34	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	persen	7,41	20,97	55.803.622	48.945.100	87,71	100
3.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	persen	100	100	34.632.930	30.284.100	87,44	100
3.1.1	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKD dan AKL	orang	30	845	34.632.930	30.284.100	87,44	100



NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
3.2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten	persen	30	30	21.170.692	18.661.000	88,15	100
3.2.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang	3	3	21.170.692	18.661.000	88,15	100
5	Hubungan Industrial	persentase perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak	persen	39,10	16,85	1.143.513.564	1.111.056.200	97,16	44
5.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	perusahaan	100	76	24.912.147	16.195.900	65,01	76
5.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	1	24.912.147	16.195.900	65,01	100
5.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	persen	100	100	1.118.601.417	1.094.860.300	97,88	100



NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
5.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	2	2	14.935.724	13.311.800	89,13	100
5.2.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Tenaga Kerja	orang	12484	12234	1.103.665.693	1.081.548.500	98,00	98
6	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Ha	12	12	29.785.477	16.129.700	54,15	90
6.1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	lokasi	1	1	29.785.477	16.129.700	54,15	90
6.1.1	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	50	1	29.785.477	16.129.700	54,15	90
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						7.193.918.813	6.828.662.031	94,92	99,91



Dari uraian tersebut jelas bahwa program/kegiatan telah dilaksanakan secara maksimal. Namunpun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang terlaksana dengan serapan anggaran yang rendah ataupun tidak terealisasi. Adanya kesenjangan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya berkaitan dengan adanya kebijakan efisiensi belanja dan atau perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaran umumnya terealisasi dengan baik dengan rata-rata realisasi 95,84%.

Tabel 3.13
Pertumbuhan Anggaran dan Belanja tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Pencapaian (%)
2020	5.595.110.026	5.546.697.245	99,13
2021	5.114.819.041	4.944.157.540	96,66
2022	6.147.254.050	6.021.856.578	97,96
2023	7.534.813.215	6.819.909.509	90,51
2024	7.193.918.813	6.828.662.031	94,92
Rata-rata Pertumbuhan	5%	4%	

Pada 5 (empat) tahun terakhir terlihat bahwa penganggaran dan realisasi berfluktuasi meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 5% pada anggaran dan 4% pada realisasinya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dengan kontribusi anggaran yang relatif meningkat sesuai kinerja yang direncanakan.



BAB IV PENUTUP

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan atau tercapai/tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah Kabupaten Luwu terkait tenaga kerja dan transmigrasi. Hasil pengukuran kinerja ini akan menunjukkan pencapaian berupa peningkatan atau penurunan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tupoksinya. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu pada Tahun Anggaran 2024 merupakan kinerja pada periode Rencana Strategis Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai adalah acuan untuk memperbaiki target-target yang belum tercapai.

Hasil pengukuran dan penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2024 berdasarkan sasaran dan indikator kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah Daerah masih dalam proses pengukuran kinerja dengan realisasi keuangan sebesar 94,92%. Hal ini menunjukkan pencapaian yang cukup baik dalam mengoptimalkan pendanaan perangkat daerah. Namunpun demikian, kinerja perlu lebih dioptimalkan lagi agar pencapaiannya lebih besar dari anggaran yang digunakan.
2. Pencapaian sasaran meningkatnya kesempatan kerja mencapai kinerja sebesar 68,76% dengan realisasi keuangan sebesar 87,71%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pencapaian ini perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya dengan penambahan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kinerja secara makro di wilayah kabupaten Luwu
3. Pencapaian sasaran meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja di Sektor Formal dan Informal mencapai kinerja 49,75% dengan realisasi keuangan sebesar 97,16%. Pencapaian ini menurun dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan dengan mengoptimalkan kegiatan yang mendukung kinerja terkait.
4. Pencapaian sasaran meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja mencapai kinerja 45,51% dengan realisasi keuangan sebesar 98,85%. Pencapaian kinerja ini menurun dari tahun sebelumnya sehingga perlu



dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran tersebut.

5. Pencapaian sasaran meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi mencapai kinerja sebesar 100% dengan realisasi keuangan 54,15%. Pencapaian ini telah cukup baik namun masih memerlukan pengembangan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Dari uraian pencapaian 5 (lima) sasaran tersebut menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Walaupun begitu, beberapa kendala dan faktor penghambat seperti; penetapan belanja, sumber daya manusia, perubahan kebijakan anggaran dan teknis pelaksanaan kegiatan. perlu dapat diantisipasi agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tetap tercapai.

Pencapaian kinerja dan beberapa kendala yang mempengaruhinya memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Berikut beberapa masukan dan saran:

- 1, Evaluasi berkala secara internal perlu dilakukan terhadap program/kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
- 2, Program/kegiatan inovatif diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu.
- 3, Indikator sasaran maupun program/kegiatan perlu dirasionalisasi agar sinergi dengan tujuan dan tupoksi setiap bidang dalam organisasi perangkat daerah.
- 4, Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan tugas pokok dan kompetensinya dalam pelaksanaan kegiatan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kami susun, sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan sebagai penyempurnaan kebijakan di tahun mendatang.

Belopa, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS,

Drs. HASBULLAH BIN MUSH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199703 1 034